

Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Pesisir Kota

Dia Ceisha Aulia

Fakultas Teknik, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia

Corresponding Author: yadiya1309@gmail.com

Info Artikel

Submitted: 26 September 2026

Revised : 29 September 2026

Accepted: 16 Oktober 2026

Published: 28 Oktober 2026

Keywords: Slum Settlements,
Coastal Areas, Typology.

Kata Kunci: Permukiman Kumuh,
Kawasan Pesisir, Tipologi.

Abstract

The existence of slum settlements in coastal areas is caused by several factors that reduce the quality of the environment so that it can affect everything from economic conditions to the lack of adequate infrastructure to the unhealthy behavior of the residents. This research aims to determine and analyze the existence of residential factors in coastal areas which are dominated by slum areas in the city of Semarang, including the concept of prevention (supervision, control and community empowerment), the concept of improving environmental quality (restoration and new development). Coastal areas are areas with high utilization and are vulnerable to environmental damage.

Abstrak

Keberadaan permukiman kumuh di kawasan pesisir di sebabkan karena beberapa faktor penurunan di lingkungan kualitas yang baik sehingga dapat mempengaruhi mulai dari kondisi ekonomi sampai minimnya sarana prasarana yang memadai hingga pada perilaku yang tidak sehat penduduk nya. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dengan adanya faktor-faktor permukiman di daerah pesisir yang di dominasi area kumuh daerah kota Semarang mencakup adanya konsep pencegahan (pengawasan, pengendalian, dan pemberdayaan masyarakat), konsep peningkatan kualitas lingkungan (pemugaran dan pembangunan baru). Wilayah pesisir merupakan wilayah dengan pemanfaatan yang tinggi dan rentan akan kerusakan lingkungan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Permukiman kumuh di kawasan pesisir akan terus eksis dan berkembang apabila tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir seperti nelayan masih rendah sehingga mereka masih belum cukup mampu untuk memperbaharui kondisi tempat tinggal mereka sendiri. Selain itu, kegiatan penelitian terhadap permukiman kumuh di kawasan pesisir merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap bencana alam yang kerap kali mengancam permukiman di kawasan pesisir. Masalah permukiman kumuh di kawasan pesisir menjadi ukuran tingkat kualitas hidup yang rendah yang salah satunya dapat dilihat dari bentuk fisik permukiman. Indonesia hal paling kompleks yang muncul dari masalah permukiman ini yakni tumbuh dan menjamurnya kawasan permukiman—permukiman kumuh yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia baik itu kota maupun kabupaten. Tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh disebabkan oleh berbagai

hal seperti urbanisasi dan pertumbuhan penduduk

Wilayah pesisir merupakan wilayah dengan pemanfaatan yang tinggi dan rentan akan kerusakan lingkungan. Salah satu faktor penyebab utama kerusakan lingkungan yang ada adalah akibat aktivitas manusia pada kawasan pesisir. Perubahan penggunaan lahan yang tidak terkendali merupakan ancaman terhadap daya dukung dan kelestarian sumberdaya pesisir. Permukiman kumuh di wilayah pesisir memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dengan permukiman kumuh di tempat lain, antara lain terlihat dari kondisi sosial-ekonomi dan fisiknya. Mereka menjelaskan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi masyarakat pesisir dari aspek lingkungan fisik adalah fenomena pasang surut air laut yang beresiko menimbulkan genangan dan merusak kondisi rumah.

Literature Review

Permukiman Pesisir

Permukiman merupakan tempat tinggal manusia yang termasuk bagian dari lingkungan alam. Permukiman memerlukan integrasi dengan lokasi eksistingnya untuk memaksimalkan potensi lingkungan. Pertumbuhan penduduk, kebutuhan lahan serta mata pencaharian juga menjadi faktor yang menyebabkan permukiman kumuh terbentuk pada kawasan pesisir. Permukiman yang berada pada wilayah pesisir umumnya ditinggali penduduk yang bekerja sebagai nelayan. Wilayah ini berada pada wilayah pertemuan antara darat dengan laut, maka letak rumah masyarakat disana menyebar ke beberapa tempat. Tipe letak rumah masyarakat pesisir ada yang berada di atas air, di daerah perbatasan antara darat dan laut serta di darat, sisi permukiman terlihat bahwa sebagian besar kondisi rumah tinggal dari masyarakat pesisir berada dalam kategori tidak layak huni dan cenderung bersifat kumuh. Pada dasarnya wilayah pesisir adalah wilayah yang merupakan tanda atau batasan wilayah daratan dan wilayah perairan yang mana proses kegiatan atau aktivitas bumi dan penggunaan lahan masih mempengaruhi proses dan fungsi kelautan.

Tipologi

Tipologi ialah sesuatu kajian yang membahas mengenai tipe. Pada umumnya, tipe digunakan guna menjelaskan keseluruhan bentuk, struktur ataupun karakter pada sesuatu objek atau bentuk tertentu.³ Permukiman kumuh ini merupakan permukiman dengan kepadatan yang tinggi, bangunan dengan kualitas rendah, minimnya ketersediaan prasarana dan sarana kondisi lingkungan serta karakteristik tersendiri pada masyarakat yang ada pada daerah tersebut. Kawasan pesisir ini ialah kawasan peralihan dari ekosistem darat dan laut yang dapat memiliki tipologi permukiman kumuh tersendiri. Tipologi ini digunakan untuk mengetahui pada wilayah

pesisir apa saja yang menjadi faktor atau karakteristik yang menyebabkan permukiman kumuh yang terbentuk. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa adanya permukiman di wilayah pesisir disebabkan dari berbagai hal serta dari masyarakat yang meninggalkan wilayah tersebut. Hal ini bisa menjadi pertimbangan kedepannya dalam penataan dan peningkatan permukiman di wilayah pesisir. Tipologi permukiman kumuh pada kawasan pesisir memiliki arti klasifikasi yang mengelompok sehingga dapat teridentifikasi berdasarkan letak lokasi permukiman tersebut secara geografis. Pengelompokan dari pola permukiman kumuh yang ada yaitu linier, clustered dan kombinasi, dimana pada kawasan pesisir didominasi dengan pola permukiman kumuh linear atau memanjang.

Permukiman Kumuh

Adanya permukiman kumuh diperkotaan harus disadari oleh semua pihak dan jika sudah terbentuk permukiman kumuh tersebut maka akan sulit dihindari. Kepadatan bangunan dapat terjadi karena banyaknya terjadi pembangunan permukiman dan ini akan terus terjadi secara berkelanjutan, terlebih lagi jika hal tersebut terjadi di kawasan pesisir yang seharusnya bukan menjadi tempat tinggal bagi warga setempat. Permukiman kumuh di wilayah pesisir memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dengan permukiman kumuh di tempat lain, antara lain terlihat dari kondisi sosial-ekonomi dan fisiknya. Mereka menjelaskan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi masyarakat pesisir dari aspek lingkungan fisik adalah fenomena pasang surut air laut yang beresiko menimbulkan genangan dan merusak kondisi rumah.

Faktor Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh di wilayah pesisir memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dengan permukiman kumuh di tempat lain, antara lain terlihat dari kondisi sosial-ekonomi dan fisiknya. Kondisi permukiman padat dan tidak berjarak antar satu bangunan dengan bangunan lainnya yang menyebabkan permukiman bersifat kumuh. Sehingga untuk mengantisipasi perkembangan permukiman hunian liar yang dipengaruhi oleh keberadaan Pesisir Pantai, maka kebijakan yang harus dilakukan yaitu dengan melakukan pengendalian perkembangan permukiman, program perbaikan kampung, relokasi, serta peningkatan kualitas perumahan sehingga perencanaan yang dicita-citakan dapat tercapai.

Keberadaan permukiman kumuh di kawasan pesisir berdampak pada penurunan kualitas lingkungan baik di lingkungan itu sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Dari hasil analisis menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi dampak permukiman kumuh terhadap kawasan pesisir yaitu faktor lingkungan, faktor sosial dan faktor ekonomi.

a. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan adalah salah satu penyebab pertama terjadinya permukiman kumuh di wilayah pesisir pantai karena wilayah pesisir sering kali memiliki topografi yang datar atau landai, yang dapat membuatnya rentan terhadap banjir, terutama saat air laut naik atau saat terjadi badai. Wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara darat dan laut yang bagian lautnya masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, dan bagian daratannya masih dipengaruhi oleh aktivitas lautan seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Wilayah pesisir juga dipengaruhi oleh proses biologis dan fisik dari perairan laut maupun dari daratan, dan didefinisikan secara luas untuk kepentingan pengelolaan sumber daya alam.

b. Faktor Sosial

Sosial merupakan sekelompok manusia yang dengan secara individu terlibat dalam berbagai aktifitas atau kegiatan secara bersama-sama. Sosial yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah yang terkait dengan perilaku masyarakat, partisipasi masyarakat serta kepedulian pemerintah di kawasan permukiman kumuh yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak terhadap kawasan pesisir .

c. Faktor Ekonomi

Berdasarkan Faktor Ekonomi Penduduk permukiman kumuh di pesisir pantai cenderung memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi dan pekerjaan informal. Penghasilan sering kali rendah dan tidak stabil, terutama untuk pekerja di sektor informal seperti nelayan kecil, pedagang kecil, atau pekerja harian serta Ketersediaan infrastruktur ekonomi dasar seperti pasar, pelabuhan, dan fasilitas kesehatan serta pendidikan dapat mempengaruhi kondisi ekonomi penduduk permukiman kumuh dan kekurangan infrastruktur dapat membatasi akses mereka terhadap pasar dan kesempatan ekonomi lainnya, sedangkan pada bagian tata ruang kondisi tata ruang yang tidak teratur atau tidak terkontrol dapat menyulitkan pengelolaan sumber daya alam seperti lahan, air, dan hutan mangrove di wilayah pesisir pantai hal tersebut di pengaruhi oleh pengelolaan yang buruk dapat mengancam keberlanjutan ekonomi permukiman kumuh dan memperburuk kerentanannya terhadap bencana.

Dampak Permukiman Kumuh di Wilayah Pesisir

Ada beberapa dampak penyebab permukiman kumuh di wilayah pesisir seperti dampak lingkungan, dampak sosial dan juga dampak ekonomi yaitu :

1. Dampak Lingkungan

Dari beberapa masalah lingkungan permukiman umuh di wilayah pesisir adalah Permukiman kumuh cenderung memiliki sistem sanitasi yang buruk atau tidak ada sama sekali, sehingga limbah domestik sering kali langsung dibuang ke perairan pantai. Ini dapat menyebabkan

pencemaran air laut dan mengancam kehidupan biota laut.

2. Dampak Sosial

Ada banyak sekali dampak sosial yang disebabkan permukiman kumuh di wilayah pesisir salah satunya adalah kondisi sanitasi yang buruk yang dapat meningkatkan risiko penyakit seperti diare, kolera, dan penyakit menular lainnya di antara penduduk permukiman kumuh. Serta rata-rata masyarakat permukiman kumuh memiliki tempat tinggal yang tergantung padat penduduk dan sering kali tinggal dalam kondisi yang tidak aman, dengan risiko penggusuran atau relokasi paksa akibat konflik tanah atau pembangunan infrastruktur.

3. Dampak Ekonomi

Dari aspek ekonomi penduduk permukiman kumuh cenderung memiliki pendapatan yang rendah dan kesempatan ekonomi yang terbatas, mengakibatkan ketimpangan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat.

Solusi Penanganan Permukiman Kumuh

Solusi penanganan permukiman kumuh terdiri atas 2 (dua) yaitu konsep pencegahan dan konsep peningkatan kualitas lingkungan.

Pencegahan. Kegiatan pencegahan dilaksanakan melalui, dua kegiatan yaitu, *pengawasan dan pengendalian*: terutama dilakukan oleh pemerintah daerah mencakup kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan pemberdayaan masyarakat: melakukan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi ini.

Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman. Kegiatan pencegahan dilaksanakan melalui 4 kegiatan yaitu pemugaran, pembangunan baru, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat. Dalam upaya peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh, pemerintah daerah menetapkan kebijakan secara holistik, penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh harus dilakukan secara multisectoral karena memerlukan koordinasi dengan berbagai bidang lain yang terkait dengan kegiatan penanganan kumuh tidak dapat ditangani oleh satu sektor saja karena merupakan tanggungjawab semua stakeholder terkait.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif penelitian yang menggunakan cara, langkah, dan prosedur yang lebih melibatkan data dan informasi yang diperoleh Sehingga bersifat deskriptif untuk memperoleh kesimpulan serta mengetahui permasalahan yang sedang terjadi dengan menjabarkan temuan atau fenomena,

menyajikannya apa adanya sesuai fakta atau temuan di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Pada sub bab ini akan menjelaskan terkait pengaruh faktor-faktor penyebab permukiman kumuh dari 3 wilayah studi kasus. Wilayah studi kasus yang penulis gunakan yaitu Desa Tambak Mulyo Kota Semarang Utara, Desa Bandengan Kota Kendal, Kecamatan Tallo Kota Makassar.

Solusi Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Semarang Utara

Bangunan rumah di kawasan kumuh Semarang Utara di daerah Tambaklorok dan tambak mulyo dapat dikatakan kurang layak huni, karena tingkat kepadatan bangunan yang tinggi telah mempengaruhi pencahayaan dan kelembaban rumah yang tergolong buruk. Struktur bangunan rumah yang sering tergenang banjir rob juga mengalami kerusakan dan menurunkan kualitas bangunan rumah warga.⁴ Maka dari itu perencanaan yang baik adalah perencanaan yang mampu mencegah serta menanggulangi kerusakan lingkungan yang terjadi adalah dengan pencegahan dan juga penanganan peningkatan di kawasan yaitu:

1. Pencegahan

Kegiatan pencegahan dilaksanakan melalui, dua kegiatan yaitu, pengawasan dan pengendalian: terutama dilakukan oleh pemerintah daerah mencakup kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- a) Melakukan penyediaan hunian tempat tinggal yang murah dan terjangkau bagi masyarakat Tambaklorok dan juga tambak mulyo memfasilitasi pembangunan infrastruktur dasar di permukiman tersebut.
- b) Meningkatkan pelayanan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat untuk mendorong peningkatan kualitas masyarakat.
- c) Memberikan sosialisasi mengenai lingkungan permukiman yang baik untuk membentuk pola perilaku masyarakat baru yang lebih memahami lingkungan.

2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman

Pada tahun 2022 di daerah Tambakmulyo sempat terjadi bencana banjir rob yang mengakibatkan jebolnya tanggul laut sehingga mengakibatkan banjir yang begitu tinggi. Hal tersebut seharusnya di perhatikan oleh pemerintahan untuk meningkatkan infrastruktur dasar yang ada seperti perbaikan tanggul dan juga sistem jaringan sanitasi yang banyak.

Peningkatan jalan Tambak Mulyo harus sesuai dengan planning kota yang mana juga sudah dituangkan dalam RTBL Kampung Bahari Tambak Lorok contohnya seperti dikembangkan pada area di sepanjang koridor Jalan Tambak Mulyo. Pada kawasan ini dilakukan penataan dan peningkatan kualitas koridor kawasan, dimana pada kondisi eksisting kawasan ini memang telah berkembang sebagai kawasan perdagangan dan jasa. serta juganterdapat satu pelabuhan utama yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pelayaran dan perdagangan di wilayah Jawa Tengah. Pelabuhan ini berperan penting dalam kegiatan ekonomi regional dan akan sangat menguntungkan jika terus ditingkatkan.

Solusi Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Kendal

Desa Bandengan adalah lokasi datarani rendahi dengan ketinggian 0 sampai 50 m, terdiri dari persawahan, lahan pertanian kecil, perkampungan dan telaga. Lahan kumuh seluas 34,77 hektar yang membentuk Kecamatan Bandengan dan Karangsari termasuk dalam wilayah Kecamatan Bandengan.⁵ Permasalahan utamanya adalah saluran drainase yang tidak terawat atau rusak, prasarana dan sarana pengolahan air limbah yang tidak memenuhi standar teknis. Oleh karena itu, ketika terjadi banjir, kawasan pemukiman Bandengan Kalansari kerap terendam banjir. Maka dari itu di perlukan sebuah penanganan dengan cara pencegahan dan peningkatan atau pembangunan yang sesuai dengan perencanaan yaitu :

1. Pencegahan

Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat adalah upaya terbaik yang harus dilakukan agar tumbuh dan berkembang masyarakat sadar lingkungan. Penyadaran akan pentingnya lingkungan merupakan tahapan strategis yang mesti dilakukan secara terencana, terarah, sistematis, berkelanjutan dan komprehensif. Penyadaran harus dimulai dari lingkungan yang terkecil karena hal tersebut merupakan cara pertama pencegahan permukiman kumuh di wilayah pesisir.

Meskipun masyarakat mengetahui dengan pasti bahwa lingkungan yang sehat adalah kebutuhan, mereka tidak secara langsung mengambil inisiatif melakukan langkah-langkah terbaik dalam menjaga kondisi lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu masyarakat harus diberdayakan dan digugah kesadarannya, terlebih lagi wilayah Desa Bandengan Kabupaten Kendal yang rata – rata penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman

Pembangunan atau peningkatan suatu kawasan harus di dukung dari segala aspek seperti aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek pemerintahan, karena ketiga aspek ini saling berkaitan satu sama lain dengan begitu peningkatan kualitas wilayah nya akan berkembang dengan baik,

aspek – aspek yang harus ditingkatkan seperti :

a) Aspek sosial dan lingkungan

Masyarakat yang paham akan pentingnya lingkungan hidup yang sehat akan menjadi pendukung terciptanya kualitas lingkungan yang baik. Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat adalah upaya terbaik yang harus dilakukan agar tumbuh dan berkembang masyarakat sadar lingkungan. Penyadaran akan pentingnya lingkungan merupakan tahapan strategis yang mesti dilakukan secara terencana, terarah, sistematis, berkelanjutan dan komprehensif.

b) Aspek ekonomi

Dengan adanya peningkatan kualitas kawasan yang baik akan mempengaruhi perekonomian masyarakat menjadi lebih maju, seperti Desa wisata yang menjadi suatu hal yang menarik dan menjadi salah satu strategi untuk memajukan suatu kawasan desa. Minapolitan sebagai prinsip perkembangan suatu daerah, dapat menjadikan desa wisata konsep untuk mengemas minapolitan yang terkesan industrialis.⁷ Diluar itu, desa wisata bisa mengstimulus masyarakatnya untuk ekologis, cinta lingkungan dan menuju *sustainable living*.

c) Aspek pemerintahan

Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung pembangunan permukiman kumuh di daerah pesisir. Ini mencakup perencanaan tata ruang yang jelas, regulasi pembangunan yang ketat, dan pengawasan yang ketat terhadap pembangunan ilegal tentunya berdasarkan perencanaan wilayah seperti mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk memperbaiki infrastruktur dasar di permukiman kumuh, serta terus mengembangkan Pelabuhan Niaga karena akan sangat menguntungkan Kabupaten Kendal dalam mengembangkan kerjasama antara Kota khususnya dalam sektor ekonomi.

Solusi Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Makassar

Kawasan pesisir Makassar mengalami degradasi daya dukung lingkungan yang cukup significant diakibatkan oleh adanya pemanfaatan ruang yang kurang terkendali dari kegiatan pembangunan serta kondisi geomorfologi kawasan pesisir yang rawan terhadap resiko bencana, Salah satu kawasan yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah adalah kawasan pesisir khususnya dikawasan pesisir Kecamatan Tallo, di karena banyak pembangunan yang tidak menerapkan konsep perencanaan. Penanganannya bisa dengan menggunakan metode pencegahan dan juga metode peningkatan kualitas lingkungan.⁸

1. Pencegahan

Ada banyak sekali wilayah di kota Makassar yang terancam mengalami permukiman

kumuh di daerah pesisir dengan di dukung oleh beberapa faktor dan yang paling banyak ada pada faktor pembangunan karena rata – rata kawasan permukiman padat penduduk menggunakan kebijakan penggunaan lahan yang tidak efisien, serta peraturan terhadap tidak terkendalinya pembangunan. Hal yang perlu di lakukan untuk pencegahan yaitu :

a) Pengembangan Mitigasi Bencana Abrasi

Mitigasi bencana abrasi melalui penanaman mangrove sangat bermanfaat, baik bagi manusia maupun bagi alam di masa depan. Oleh karena itu penting menumbuhkan kesadaran masyarakat Kota Makassar khususnya wilayah pesisir untuk menjaga mangrove dengan tidak mengeksploitasi mangrove secara berlebihan.⁹

b) Pengelolaan Wilayah Pesisir

Tidak menempatkan fungsi kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan laut pada wilayah pesisir Kota Makassar. Hanya fungsi kegiatan yang langsung berhubungan dengan kelautan yang ditempatkan pada wilayah pesisir seperti pelabuhan, pelabuhan perikanan, pangkalan angkatan laut, dan dalam batas wilayah resort rekreasi pantai.

2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman

Wilayah pesisir harus sangat di perhatikan terlebih lagi apabila di kawasan pesisir tersebut terdapat permukiman padat penduduk hal tersebut sangat mempengaruhi kegiatan di wilayah pesisir dengan pengembangan wilayah pantai secara mengelompok (clustered) terlebih lagi dalam hal pengembangan wilayah pantai diarahkan ke pedalaman. Dengan konsepsi ini diharapkan bahwa permasalahan yang mungkin dapat ditimbulkan oleh penngunaan tanah pantai secara ekstensif sepanjang pantai dapat dibatasi. Demikian pula akibat yang mungkin dapat ditimbulkan sehubungan dengan gangguan terhadap kelestarian lingkungan hidup dapat dibatasi dan dilokalisasi ke arah tertentu yang memungkinkan pengontrolan yang lebih efektif.¹⁰

Rencana pengembangan wilayah pantai sedemikian rupa sehingga permasalahan pengembanagan pantai dapat dikendalikan dan diarahkan kepada tujuan-tujuan pembangunan wilayah pantai yang lebih baik. Dalam hubungan ini pengadaan peraturan bangunan dan garis sempadan pembangunan wilayah pantai adalah penting sekali. Perlu dipertimbangkan dalam hal ini bahwa usaha-usaha pembangunan baru di wilayah pantai hanya diperbolehkan di bagian yang mengarah ke daerah pedalaman. Dengan demikian pengembangan yang memanjang pantai dapat dikendalikan.

Tabel 1. Hasil Studi Penelitian

Studi Kasus	Variabel	Indikator	Parameter
		Penyebab Permukiman Kumuh	Penanganan

Kota Semarang	Kondisi Fisik	Ketersediaan sarana dan prasarana permukiman terutama pada pengelolaan sampah dan proteksi kebakaran masih minim.	Perlu nya kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kualitas permukiman kumuh dengan menjaga kebersihan lingkungan. Perlunya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki sarana dan prasarana permukiman terutama pada pengelolaan sampah dan proteksi kebakaran.
Kota Kendal	Kondisi Fisik	Dengan keterbatasan lahan dan kemampuan ekonomi Tentu masalah ini bukan hal yang mudah untuk diselesaikan. Selain kurangnya jumlah unit hunian masalah kepadatan dan kelayakan bangunan juga menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan karena masih banyak rumah yang belum memenuhi standar kelayakan bangunan. ¹¹	Perlu adanya Perencanaan hunian yang dapat mengatasi kekumuhan akibat kepadatan penduduk, rendahnya kualitas lingkungan, rumah tidak layak huni dan kondisi perekonomian masyarakat yang lemah.
Kota Makassar	Kondisi Fisik	Kota Makassar yang merupakan ibu kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya, urbanisasi berdampak pada kemiskinan dan ketimpangan sosial sehingga mengharuskan masyarakat untuk tinggal di daerah pinggir pesisir yang seharusnya tidak layak huni. Hal ini merupakan salah satu faktor permukiman kumuh di wilayah pesisir.	Implementasi program penanganan permukiman kumuh pesisir Kota Makassar seharusnya dilakukan perbaikan atau pembangunan kembali permukiman kumuh dan permukiman kumuh menjadi perumahan dan permukiman layak huni. ¹²

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Pada umumnya faktor penyebab permukiman kumuh di daerah perkotaan berbeda-beda berdasarkan kondisi wilayah masing-masing, salah satu nya pada wilayah pesisir pantai yang sangat rawan sekali dengan bencana alam seperti banjir dan rob. Seperti yang terdapat pada wilayah studi yang penulis pilih yaitu di Kota Semarang, Kota Kendal, dan Kota Makassar. Ketiga kota tersebut merupakan kota besar yang memiliki jumlah penduduk yang lumayan padat dan terus meningkat setiap tahunnya, hal ini menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah untuk mengatur serta mengelola kawasan tersebut dengan baik sesuai dengan tata kelola kota,

apabila tidak di kelola dengan baik akan mengakibatkan terjadinya permukiman kumuh yang sangat merugikan pemerintah dan masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil analisa dengan melihat permasalahan dan juga faktor penyebab permukiman kumuh dapat di simpulkan bahwa permukiman kumuh di wilayah pesisir yang paling besar di sebabkan oleh Faktor lingkungan yaitu seperti permukiman penduduk yang sangat padat di wilayah pesisir. Hal ini perlu dilakukan pencegahan untuk meminimalisir terjadinya bencana alam yang tidak diinginkan, dan tata kelola kota yang baik selanjutnya akan dilakukan pengembangan atau peningkatan lingkungan di wilayah pesisir dengan memanfaatkan ke unggulan yang ada di kota tersebut.

Saran

Wilayah pesisir merupakan wilayah yang seharusnya lebih di perhatikan karena sumber daya alam yang sangat penting. Berbagai aktifitas sosial dan ekonomi membutuhkan lokasi pesisir, dan banyak wilayah pesisir mempunyai nilai penting, habitat alam, dan sejarah yang tinggi, yang harus dijaga dari kerusakan secara sengaja maupun tidak sengaja. Meningkatnya permukaan air laut dan kebutuhan pembangunan perlu dipadukan dengan nilai-nilai khusus yang dimiliki pantai, maka dari itu Rencana tata ruang wilayah pesisir diperlukan untuk menjaga kelestarian pantai di satu sisi dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada sisi yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Damisi, D. M., Kumurur, V. A., & Sela, R. L. E. (2014). Analisis faktor-faktor kekumuhan kawasan permukiman pesisir tradisional (Studi kasus: Desa Bajo Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo). *Jurnal Sabua*, 6(1), 163–172. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/sabua/article/view/5282>
- Kusumaningsih, F. R., Umar, M. J., Hanum, F., Arum, A., Fariz, T. R., & Amalia, A. V. (2023). Dampak banjir pasang surut (rob) terhadap masyarakat pesisir di Kota Semarang. *Proceeding Seminar Nasional IPA XIII*, 695–702.
- Naing, N., & Ikhsan B, A. M. (2016). Model penataan permukiman kumuh untuk pengelolaan bencana di kawasan pesisir Makassar (Studi kasus: Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah). *Losari: Jurnal Arsitektur Kota dan Pemukiman*, 95–104. <https://doi.org/10.33096/losari.v1i2.46>
- Nurdiana, A., Fauziyah, S., & Sutanto, S. (2020). Pendampingan inventarisasi faktor penyebab banjir dan rob di DAS Kendal Kabupaten Kendal. *Jurnal Pengabdian...*, 1(4), 290–293. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpv/article/view/9380>

- Putri, G. T., Karmilah, M., & Rahman, B. (2023). Tipologi permukiman kumuh pesisir. *Jurnal Kajian Ruang*, 3(1), 72. <https://doi.org/10.30659/jkr.v3i1.29528>
- Robichin, M. A., Tamsil, A., & Hadijah, S. (2019). Analisis dampak permukiman kumuh terhadap kawasan pesisir Kelurahan Tallo. *Journal of Indonesian Tropical Fisheries (Joint-Fish): Jurnal Akuakultur, Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap, Ilmu Kelautan*, 2(1), 111–123. <https://doi.org/10.33096/joint-fish.v2i1.42>